Pangripta Sembada : Jurnal Perencanaan Pembangunan, Vol 2 No 2, pp 124-146
ISSN: 3090-3173

STRATEGI PEMULIHAN PASCABENCANA ERUPSI MERAPI BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN WILAYAH DI KABUPATEN SLEMAN

Dwi Jati Marta
Program Pascasarjana Manajemen Bencana Universitas Pertahanan Indonesia
dwijati73@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemulihan pascabencana erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Sleman melalui pendekatan ketahanan wilayah berbasis kearifan lokal. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif dengan metode hermeneutik-filosofis untuk menafsirkan makna mendalam dari praktik sosial dan nilai budaya masyarakat Merapi dalam menghadapi bencana. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis menggunakan perangkat lunak *NVivo 12 Plus* guna memetakan indikator ketahanan sosial, ekonomi, dan budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Merapi memiliki ketahanan sosial yang tinggi melalui solidaritas komunal dan nilai *guyub rukun*, ketahanan ekonomi melalui adaptasi sektor pariwisata berbasis erupsi, serta ketahanan budaya melalui pelestarian ritual dan filosofi hidup *hamemayu hayuning bawana*. Integrasi antara pengetahuan lokal dan kebijakan pemerintah terbukti memperkuat sistem manajemen bencana yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara kearifan lokal dan inovasi modern perlu terus ditingkatkan untuk memperkuat ketangguhan masyarakat di kawasan rawan bencana vulkanik.

Kata Kunci: Ketahanan Wilayah, Kearifan Lokal, Pascabencana.

ABSTRACT

This study aims to analyze post-disaster recovery strategies following the Merapi eruption in Sleman Regency through a regional resilience approach grounded in local wisdom. A qualitative, hermeneutic-philosophical method was applied to interpret the deeper meaning behind social practices and cultural values of Merapi communities in disaster response. Data were collected through literature studies and analyzed using NVivo 12 Plus to map social, economic, and cultural resilience indicators. The results indicate that Merapi communities demonstrate strong social resilience through communal solidarity and the value of guyub rukun, economic resilience through tourism-based adaptation, and cultural resilience through the preservation of rituals and the hamemayu hayuning bawana philosophy. The integration of local wisdom with government policy effectively strengthens a more inclusive and sustainable disaster management system. Therefore, continued synergy between traditional knowledge and modern innovation is essential to enhance community resilience in volcanic hazard-prone areas.

Keywords: Local Wisdom, Post-Disaster, Regional Resilience.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak di Kawasan Asia Tenggara yang memiliki tingkat kerentanan bencana alam sangat tinggi, terutama letusan gunung berapi. Kondisi ini terjadi karena Indonesia berada pada wilayah *Ring of Fire* atau Cincin Api (Prakoso et al., 2022). Salah satu gunung berapi dengan aktivitas vulkanik paling intens di Indonesia adalah Gunung Merapi (Maharani et al., 2020), yang juga termasuk salah satu gunung berapi paling aktif di dunia (Mei et al., 2016). Akibatnya, kawasan di sekitarnya memiliki potensi ancaman dan risiko bahaya yang sangat besar.

Gunung Merapi terletak di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan koordinat geografis 110°26’30” BT dan 7°32’30” LS (Antriyandarti et al., 2013).

Wilayah sekitarnya dihuni oleh sekitar 3,7 juta jiwa penduduk. Sejak tahun 1672 hingga 2025, Gunung Merapi telah mengalami lebih dari 100 kali erupsi, dengan interval aktivitas antara 1–5 tahun atau rata-rata setiap 4 tahun sekali (Romadhoni & Weadcaksana, 2025). Dalam kurun waktu satu abad terakhir, erupsi paling besar terjadi pada tahun 2010 dan menjadi salah satu bencana besar nasional terbesar yang pernah dicatat (Mohtar, 2023).

Bencana alam merupakan salah satu jenis bencana yang dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan (Bakkour et al., 2015). Guncangan ekonomi dapat terjadi secara periodik, dengan tingkat dampak yang bervariasi antarwilayah, demikian pula kemampuan setiap wilayah dalam melakukan penyesuaian dan pemulihan (Stanickova & Melecký, 2018).

Dari hasil penelitian yang dilakukan Wahyuni & Sakir (2021) mengungkapkan bahwa erupsi Merapi tahun 2010 menewaskan 354 orang, melukai 240 orang, dan memaksa 47.486 orang mengungsi. Erupsi tersebut juga menyebabkan kerusakan fisik yang luas, meliputi 2.636 rumah rusak berat, 156 rumah rusak sedang, dan 632 rumah rusak ringan. Skala erupsi 2010 memperluas jangkauan wilayah rawan bencana dibandingkan erupsi-erupsi sebelumnya. Akibatnya, lebih dari 2.200 keluarga harus direlokasi dari permukiman awal mereka. Proses relokasi tersebut kemudian dilaksanakan sebagai bagian dari tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (Mei et al., 2016).

Kerjasama berbagai elemen seperti pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait sangat penting untuk mempercepat pemulihan wilayah pascabencana, terutama ketika aktivitas

perekonomian terhenti dan kehidupan sehari-hari warga di daerah terdampak mengalami kelumpuhan. Selain itu, menurut Buchari (2020), tanggap darurat bencana diperlukan untuk menangani dampak yang ditimbulkan serta memulihkan infrastruktur dan fasilitas dasar pascabencana. Pemerintah di semua tingkatan bersama masyarakat lokal dapat menyusun perencanaan mitigasi bencana untuk mempercepat pemulihan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur sehingga wilayah terdampak dapat kembali berfungsi secara normal (Anjasni, 2013).

Masyarakat lokal memiliki peran besar dalam identitas kolektifnya yang tidak terlepas dari cara mereka memaknai fenomena alam yang terjadi. Strategi untuk memfasilitasi integrasi yang lebih baik terhadap isu-isu kebencanaan sebaiknya mencakup pelatihan bagi pemangku kepentingan lokal dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan proyek penguatan ketahanan melalui pemerintah daerah dan LSM (didanai oleh lembaga tingkat yang lebih tinggi), serta pemberian insentif bagi pendekatan yang terintegrasi secara lokal (Djalante et al., 2013).

Meskipun menimbulkan banyak kerusakan, keberadaan Gunung Merapi bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya memiliki makna yang sangat penting (Gunawan, 2014). Masyarakat telah hidup di sekitar kawasan Gunung Merapi selama ratusan tahun dan memiliki keterikatan sosial terhadap lingkungannya (Akbar, 2019). Kesuburan tanah Merapi dan keindahan alamnya memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hudayana, 2021), baik bagi penduduk di lereng gunung maupun masyarakat umum di Yogyakarta.

Secara umum, komposisi tanah di sekitar kawasan Gunung Merapi digunakan sebagai lahan pertanian (Antriyandarti et al., 2013). Beberapa potensi sumber daya alam muncul setelah erupsi, seperti hamparan pasir luas serta pertumbuhan berbagai jenis tanaman yang kini telah menjadi hutan lebat di kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Merapi.

Dalam hasil penelitian Yusrifa & La'ia (2015) mencatat bahwa potensi pariwisata juga tumbuh berkat kerjasama warga lokal, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan seperti wisata vulkanik (*volcano tour*) yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah Sleman serta mampu membangkitkan kembali semangat warga untuk bangkit dari kesulitan. Optimisme tinggi ini didorong oleh pandangan hidup dan kearifan lokal masyarakat, seperti prinsip hidup dalam harmoni. Kearifan lokal berkontribusi signifikan dalam memahami bahasa alam

sekaligus membangkitkan semangat hidup masyarakat agar dapat segera pulih dari dampak bencana.

Terkait dengan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana, hal ini tercantum dalam Perda Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana pada Pasal 60. Peraturan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui berbagai kegiatan yang dapat menumbuhkan inisiatif dan kapasitas masyarakat. Kegiatan tersebut juga harus memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

Upaya ini sejalan dengan visi ketahanan wilayah yang merupakan bagian dari keamanan nasional. Ketahanan wilayah harus didukung oleh ketahanan masyarakat, dimulai dari ketahanan keluarga dan individu. Konsep ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga keberlangsungan hidup bangsa dan negara (Hediarto, 2016). Salah satu bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu adalah Erupsi Merapi, yang dapat mengancam kehidupan masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemulihan pascabencana Erupsi Merapi berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan ketahanan wilayah di Kabupaten Sleman.

Beberapa penelitian tentang Erupsi Merapi telah dilakukan, tetapi belum ada pembahasan mengenai strategi pemulihan pascabencana Erupsi Merapi berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan ketahanan wilayah di Kabupaten Sleman. Beberapa penelitian terbaru telah membahas variabel penelitian terkait upaya pemulihan pascaerupsi Merapi berbasis kearifan lokal. Pertama, penelitian oleh Rahman et al. (2016) menganalisis ketahanan masyarakat terhadap bahaya erupsi Gunung Merapi dengan menggunakan 16 indikator ketangguhan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aktivis pengurangan risiko bencana, masyarakat, dan pemerintah. Lokasi penelitian mencakup Kecamatan Cangkringan, Kelurahan Kepuharjo, serta 3 (tiga) desa yaitu Kaliadem, Petung, dan Jambu yang seluruhnya berada di Kawasan Rawan Bencana III Gunung Merapi. Analisis data dilakukan menggunakan *Pasteur Framework*.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa ketahanan masyarakat Merapi dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, yaitu kemampuan kolektif dalam

membangun jaringan sosial (*social networks*), keberadaan sistem peringatan dini berbasis komunitas, pengalaman historis menghadapi erupsi yang membentuk pengetahuan lokal, serta efektivitas koordinasi antara warga dan pemerintah dalam respons darurat. Penelitian ini menekankan bahwa modal sosial dan pengetahuan lokal merupakan elemen paling dominan dalam memperkuat ketangguhan masyarakat di wilayah rawan bencana.

Kedua, penelitian oleh Permana et al. (2020) menunjukkan bahwa masyarakat Cangkringan memiliki kearifan lokal dalam mengelola aspek ekonomi pascaerupsi dengan membuka lembaga usaha seperti koperasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan observasi partisipatif dan wawancara terstruktur sebagai teknik pengumpulan data. Selanjutnya, penelitian oleh Prakoso et al. (2022) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki pendekatan khas dalam menangani bencana, dengan identitas budaya sebagai konsep dominan dalam kehidupan masyarakat. Faktor yang dianggap paling penting adalah keberadaan pemimpin lokal yang mampu memengaruhi dan menggerakkan masyarakat.

Selain itu, untuk mengidentifikasi arah dan celah penelitian, peneliti melakukan analisis bibliometrik menggunakan perangkat lunak pendukung pemetaan topik penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa kajian mengenai erupsi Merapi selama ini lebih banyak berfokus pada aspek teknis dan dampak langsung bencana. Berdasarkan penelusuran literatur, penelitian terkait ketahanan wilayah berbasis kearifan lokal di kawasan sekitar Gunung Merapi masih belum banyak dieksplorasi, khususnya dalam konteks pemulihan pascabencana.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai strategi pemulihan pascabencana yang mengintegrasikan kearifan lokal sebagai elemen penguatan ketahanan wilayah. Secara khusus, penelitian ini menganalisis bagaimana bentuk ketahanan wilayah dalam upaya pemulihan pascaerupsi di Kabupaten Sleman, dengan mempertimbangkan peran pemerintah dan berbagai aktor lokal dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat multidisipliner dengan memadukan pendekatan hermeneutika-filosofis, yaitu pendekatan yang menekankan penafsiran mendalam terhadap pengalaman, simbol, dan praktik sosial untuk memahami makna yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini

memungkinkan penelitian tidak hanya bertumpu pada data empiris, tetapi juga menggali dimensi interpretatif yang melekat pada konteks sosial dan kultural masyarakat pascaerupsi Gunung Merapi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif interpretatif, dengan proses penafsiran sebagai inti analisis untuk mengungkap nilai, makna, dan pemahaman yang tersembunyi di balik data.

Fokus penelitian diarahkan pada strategi pemulihan pascaerupsi Gunung Merapi sejak tahun 2010 hingga 2024 yang melibatkan sinergi pemerintah daerah, komunitas lokal, dan para pemangku kepentingan. Selain menelaah nilai budaya dan kearifan lokal sebagai dasar ketangguhan wilayah, penelitian ini juga menggunakan kajian literatur terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi daerah, seperti PP No. 21 Tahun 2008, Perda Sleman No. 7 Tahun 2013, dan Perka BNPB No. 5 Tahun 2011. Integrasi antara literatur ilmiah dan analisis regulasi daerah dilakukan untuk melihat konsistensi, efektivitas, serta hubungan antara kerangka hukum dan praktik pemulihan sosial-budaya di lapangan.

Sebagai tahap awal, pemetaan bibliometrik dilakukan menggunakan *VOSViewer* guna mengidentifikasi tren, pola, dan ruang kebaruan penelitian terkait Merapi (van Eck & Waltman, 2010). Hasilnya menunjukkan dominasi kajian teknis dan dampak fisik, sementara penelitian tentang ketahanan wilayah berbasis nilai budaya masih terbatas. Temuan ini menjadi dasar penentuan arah analisis dan kebaruan penelitian.

Tahapan penelitian selanjutnya mengikuti prosedur inventarisasi, klasifikasi, pengorganisasian, dan analisis induktif sebagaimana dianjurkan pendekatan kualitatif interpretatif (Creswell & Poth, 2018). Literatur dikumpulkan melalui *Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, SINTA,* dan Garuda dengan kata kunci Merapi *recovery*, *disaster management, local knowledge*, dan *community resilience*. Dari 50 artikel awal, proses seleksi menghasilkan 30 artikel paling relevan, sekaligus dipadukan dengan dokumen kebijakan nasional dan daerah terkait penanggulangan bencana.

Prinsip hermeneutika-filosofis, terutama lingkaran hermeneutik (Gadamer, 2013), menjadi landasan peneliti bergerak dari pemahaman menyeluruh ke bagian-bagian spesifik dan kembali pada totalitas makna. Dokumen regulasi daerah juga ditafsirkan hermeneutik untuk melihat bagaimana kebijakan mengekspresikan nilai, orientasi, dan prioritas pemerintah dalam konteks pemulihan.

Untuk memperdalam analisis, peneliti memanfaatkan perangkat lunak *NVivo 12 Plus* sebagai bagian dari *CAQDAS (Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software*). Penggunaan *NVivo* berfungsi melengkapi hasil pemetaan *VOSViewer* karena menjadi alat utama untuk mengolah data secara sistematis melalui beberapa fitur:

1. *Create New Project* mengelola dan menyimpan seluruh literatur terkait kearifan lokal dan pemulihan pascabencana.
2. *Import Function* memasukkan berbagai jenis data seperti artikel ilmiah, catatan observasi, dokumen kebijakan, dan hasil wawancara dari penelitian relevan.
3. *Node* berfungsi mengelompokkan tema dan kategori data dalam proses pengkodean sehingga memudahkan identifikasi pola dan makna.
4. *Crosstab* membantu menelusuri hubungan antar kategori, menguji keterkaitan antar variabel sosial serta memperkuat validitas temuan.

Tahapan ini merupakan bagian inti dari proses analisis induktif, yaitu menarik pola dan generalisasi berdasarkan kategori yang muncul dari data. *NVivo* tidak hanya meningkatkan ketelitian teknis, tetapi juga memperkuat transparansi dan replikabilitas analisis kualitatif (Bazeley & Jackson, 2013).

Tahap akhir analisis dilakukan dengan pendekatan hermeneutika-filosofis yang memandang pemahaman sebagai proses dialogis antara peneliti, teks sosial, dan konteks historis masyarakat Merapi (Muslih et al., 2021). Dalam penelitian kontemporer, hermeneutika digunakan untuk menggali makna simbolik yang tidak tampak secara langsung dari data empiris, seperti nilai kearifan lokal, tradisi masyarakat, serta praktik sosial pascabencana (Huda et al., 2025). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna simbolik dari kearifan lokal, regulasi kebencanaan, serta praktik sosial pemulihan

Dengan integrasi bibliometrik, analisis kualitatif berbantuan perangkat lunak, kajian regulasi daerah, dan pendekatan hermeneutik, seluruh tahapan penelitian berjalan sistematis dan terukur. Pendekatan komprehensif ini menghasilkan pemahaman mendalam tentang bagaimana nilai budaya, sistem sosial, dan kerangka kebijakan berinteraksi membentuk ketahanan sosial dan strategi pemulihan pascaerupsi Gunung Merapi secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan ini memaparkan temuan utama penelitian mengenai bagaimana kearifan lokal masyarakat lereng Gunung Merapi berperan dalam membentuk ketahanan sosial dan mendukung proses pemulihan pascaerupsi. Temuan disusun berdasarkan analisis literatur, pemetaan bibliometrik, serta pengolahan data kualitatif menggunakan *NVivo*, yang secara bersama-sama mengungkap pola nilai budaya, praktik sosial, dan dinamika komunitas dalam merespons bencana.

Secara garis besar, hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hidup masyarakat Merapi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mitigasi, respons, dan pemulihan bencana. Integrasi antara nilai budaya, kebijakan pemerintah, dan adaptasi ekonomi menjadi kunci terbentuknya ketahanan wilayah yang berkelanjutan. Pembahasan berikut menguraikan 3 (tiga) aspek utama, yaitu (1) kearifan lokal masyarakat dalam menghadapi erupsi, (2) peran pemerintah dalam penanganan pascabencana erupsi, dan (3) strategi pemulihan pascabencana erupsi Gunung Merapi untuk ketahanan wilayah.

Kearifan Lokal Masyarakat dalam Menghadapi Erupsi

Mitos sebagai figur budaya yang bijak terlahir dari cara pandangan menjalani hidup dan budaya tradisional yang mengalir, kemudian membawa misi keberlanjutan dan keseimbangan alam semesta. Sebagai bagian dari masyarakat tradisional Jawa, khususnya dalam lingkup budaya Keraton Yogyakarta, masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Merapi meyakini bahwa erupsi merupakan bagian dari siklus kehidupan makhluk ciptaan Tuhan. Gunung Merapi dipersonifikasikan sebagai *eyang* atau leluhur yang melindungi penduduk di sekitarnya (Hudayana, 2021).

Kepercayaan terhadap roh leluhur yang menyatu dengan keyakinan akan kekuatan alam yang memengaruhi kehidupan manusia mewarnai kehidupan religius dan adat masyarakat Jawa. Ciri khasnya tercermin dalam *sinkretisme, tantularisme, kejawen* yang toleran, serta sifat akomodatif dan optimis. Istilah *Javanese Way of Life* (Pandangan Hidup Orang Jawa) sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti Filsafat Jawa atau Filsafat Kejawen (Wasisto, 2021). Pandangan hidup Jawa tidak identik dengan agama, mistisisme, atau ilmu gaib, akan tetapi merupakan pandangan hidup secara luas mencakup hubungan manusia dengan Tuhan, alam

semesta dan posisinya di dalam ciptaan tersebut (Marta et al., 2022).

Komunitas lokal yang dikenal sebagai masyarakat *Kejawen* memandang erupsi Gunung Merapi bukan hanya sebagai peristiwa fisik atau ekologis, melainkan juga sebagai realitas spiritual (*sasmita*) yang mengandung pesan moral dan religius. Erupsi diyakini sebagai peringatan dari Sang Pencipta agar manusia melakukan introspeksi diri terhadap hubungannya dengan Tuhan. Ketidakharmonisan antara manusia dan Tuhan dianggap perlu dipulihkan melalui *metanoia* atau proses penyucian diri, yang diwujudkan dalam sikap hidup dan ritual persembahan oleh masyarakat Kejawen (Yusrifa, 2017).

Terdapat 4 (empat) jenis ritual adat yang dilakukan di kawasan Gunung Merapi, antara lain ritual mitigasi dan rekonstruksi bencana (*Merti Bumi*), ritual Tahun Baru Jawa, dan ritual pembersihan dusun (*Gugur Gunung*). Ritual-ritual ini diyakini dapat memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana sekaligus menjadi pengejawantahan nilai *Hamemayu Hayuning Bawana*, yakni menjaga keindahan dan keselamatan alam semesta.

Bagi masyarakat di kawasan Gunung Merapi, nilai ini berarti memelihara kesejahteraan hidup, menjauhkan diri dari sifat amarah dan menciptakan keseimbangan dengan alam (Tyas et al., 2021). Dalam setiap ritual di Gunung Merapi, doa keselamatan dan permohonan berkah selalu disertai penghormatan kepada benda-benda pusaka atau leluhur seperti *Eyang*, *Danyang*, *Kiai Petruk* dan lainnya yang dianggap memiliki kekuatan spiritual dan merupakan warisan budaya dari Keraton Yogyakarta (Hudayana, 2021).

Tradisi lain yang tidak kalah penting dalam memaknai fenomena di Gunung Merapi adalah *Labuhan*. Masyarakat melaksanakan upacara adat ini sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus permohonan perlindungan agar terhindar dari mara bahaya. Tradisi *Labuhan Gunung Merapi* dilaksanakan setiap tanggal 30 *Rajab* (kalender Jawa) dalam rangka memperingati penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Labuhan berarti “melarungkan” atau “melimpahkan” benda-benda tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak Keraton sebagai bentuk persembahan. Dalam prosesi tersebut, *Mustoko Apem dan Ubo Rampe* diserahkan kepada pejabat daerah dan juru kunci Gunung Merapi. Tujuannya adalah untuk melestarikan budaya leluhur sejak masa Sultan Agung serta mendoakan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Yogyakarta. Tradisi ini juga

diyakini dapat meningkatkan kepekaan manusia terhadap tanda-tanda alam (Yusrifa, 2017).

Terdapat 3 (tiga) unsur kebudayaan utama yang membentuk kearifan lokal masyarakat Merapi dalam menghadapi fenomena alam, yakni sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem tradisi (Daeng, 2008). Berdasarkan hasil kajian literatur, sistem nilai muncul sebagai unsur yang paling dominan (37%), disusul oleh sistem tradisi (35%) dan sistem pengetahuan (28%). Dominasi sistem nilai menunjukkan bahwa cara masyarakat memahami, menafsirkan, dan merespons ancaman erupsi sangat dipengaruhi oleh keyakinan moral, pandangan hidup, serta orientasi makna yang mereka anut.

Kuatnya sistem nilai ini tercermin, misalnya, dalam cara masyarakat memandang Merapi sebagai sosok leluhur yang harus dihormati, sehingga tindakan mitigasi dan pemulihan sering dibingkai melalui nilai-nilai penghormatan, keseimbangan, dan keselarasan dengan alam. Nilai-nilai ini kemudian menuntun terbentuknya tradisi tertentu seperti ritual *Labuhan* yang pada akhirnya menjadi bagian dari sistem pengetahuan kolektif masyarakat. Dengan demikian, nilai, tradisi, dan pengetahuan tidak berdiri sendiri, tetapi saling menopang dan membentuk struktur kearifan lokal yang memungkinkan masyarakat Merapi beradaptasi secara lebih tangguh terhadap siklus erupsi.

Terdapat kekayaan pengetahuan lokal dalam bentuk kecerdasan tradisional yang berkaitan dengan mitigasi bencana erupsi Merapi. Pengetahuan ini meliputi petuah masyarakat, perilaku hewan, kondisi vegetasi alam, dan tanda-tanda lingkungan fisik (Wardyaningrum, 2019). Salah satu bentuk semiotika budaya yang dikenal luas adalah istilah "*prosesion*", yang menggambarkan aliran lahar dingin berisi material vulkanik dan sedimen. Selain itu, semiotika fauna berupa perilaku hewan yang menjauh dari Gunung Merapi juga dianggap sebagai pertanda alam akan terjadinya erupsi (Setyawati et al., 2015). Pengetahuan lokal semacam ini terus berkembang dan diwariskan secara turun-temurun di tengah masyarakat.

Masyarakat di kawasan Gunung Merapi sebagai komunitas yang hidup di wilayah rawan bencana, telah memiliki mekanisme adaptif dalam menghadapi dan mengelola bencana. Pengalaman panjang dalam menghadapi erupsi telah membentuk kapasitas pemulihan (*resilience*) yang tinggi. Kearifan lokal tidak hanya memperkuat kemandirian komunitas dalam proses pemulihan trauma, tetapi juga membentuk cara pandang spiritual yang membuat masyarakat mampu

bangkit dengan cepat pascabencana. Nilai-nilai ini hidup dan dijaga melalui figur-figur spiritual yang dihormati serta diakui baik oleh masyarakat maupun sistem pemerintahan lokal (Gunawan, 2014).

Pengetahuan mengenai jenis-jenis erupsi dan dampaknya memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat, terutama dalam upaya mitigasi untuk menyelamatkan nyawa. Pengetahuan menjadi faktor kunci kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko bencana. Kesiapsiagaan sendiri merupakan elemen penting dari upaya proaktif pengurangan risiko bencana (Kurniawati & Suwito, 2017). Mitigasi bencana di kawasan Merapi menjadi unik karena menggabungkan kemajuan teknologi melalui sistem informasi terintegrasi dengan kearifan lokal masyarakat (Yusrifa, 2017). Pendekatan yang harmonis antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadikan proses pemulihan pascabencana lebih cepat dan adaptif terhadap kemungkinan erupsi di masa mendatang.

Secara keseluruhan, kearifan lokal masyarakat Merapi membentuk suatu sistem adaptif yang menyatukan nilai-nilai spiritual, praktik tradisional, dan pengetahuan empiris tentang gunung tersebut. Pemaknaan terhadap Merapi sebagai leluhur, penyelenggaraan ritual seperti Labuhan dan Merti Bumi, serta observasi tanda-tanda alam seperti perilaku fauna dan perubahan vegetasi menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap erupsi tidak semata berbasis pada aspek teknis, tetapi juga pada struktur makna dan filosofi hidup yang telah diwariskan turun-temurun. Dominasi sistem nilai dalam kearifan lokal membuktikan bahwa ketangguhan masyarakat Merapi bukan hanya hasil dari pengalaman menghadapi bencana, tetapi juga dari orientasi kultural yang menempatkan keharmonisan manusia–alam sebagai prinsip hidup.

Dengan demikian, kearifan lokal masyarakat Merapi berfungsi sebagai fondasi sosial-budaya dalam meningkatkan kapasitas adaptif, ketahanan komunitas, serta efektivitas mitigasi dan pemulihan pascabencana. Integrasi antara nilai, tradisi, dan pengetahuan lokal menjadikan masyarakat Merapi mampu bertahan dan bangkit dari berbagai siklus erupsi, sekaligus memperlihatkan bahwa budaya memiliki peran strategis dalam membentuk resiliensi wilayah rawan bencana.

Peran Pemerintah dalam Penanganan Pascabencana Erupsi

Erupsi Gunung Merapi tahun 2010 membawa perubahan signifikan bagi wilayah terdampak, baik pada aspek

infrastruktur maupun kondisi sosial budaya masyarakat. Pemulihan wilayah pascabencana kemudian menjadi fokus utama pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam aturan tersebut, bencana dipahami sebagai peristiwa yang mengancam kehidupan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi serta dampak psikologis, sehingga membutuhkan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi yang komprehensif.

Regulasi nasional ini menegaskan dua aspek penting penanganan pascabencana. Pertama, rehabilitasi, yakni pemulihan pelayanan publik dan fungsi sosial-ekonomi masyarakat hingga mencapai kondisi memadai. Kedua, rekonstruksi, yang mencakup pembangunan kembali infrastruktur, perekonomian, dan tata kehidupan sosial budaya secara berkelanjutan. Pemahaman ini sejalan dengan temuan beberapa studi yang menyoroti pentingnya pemulihan sosial budaya dalam konteks bencana, di mana normalisasi kehidupan masyarakat tidak cukup dilakukan melalui pembangunan fisik semata, tetapi memerlukan pemulihan psikologis, identitas budaya, dan fungsi sosial komunitas (Otani et al., 2018).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 juga menekankan bahwa perumusan rencana rehabilitasi harus mempertimbangkan standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat dan faktor ekonomi. Aspek-aspek sosial dan budaya ini terbukti memengaruhi efektivitas pemulihan, karena masyarakat cenderung kembali pada pola hidup tradisional dan nilai-nilai lokal dalam menata kehidupan pascabencana (Hudayana, 2021).

Landasan regulatif ini diterjemahkan lebih rinci dalam tingkat daerah, salah satunya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana yang menetapkan prioritas rehabilitasi, sumber pendanaan dan mekanisme pelaksanaan penanggulangan bencana. Dalam peraturan ini, pemerintah daerah bertanggung jawab mempercepat pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya melalui program yang terkoordinasi bersama BPBD sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana.

Peran pemerintah daerah tidak hanya bersifat formal-administratif, tetapi juga adaptif terhadap karakter sosial-budaya masyarakat Merapi. Banyak studi menyoroti bahwa pemulihan

pascabencana menjadi efektif ketika kebijakan pemerintah berpadu dengan partisipasi masyarakat dan kearifan lokal, seperti nilai harmoni, gotong royong dan kepatuhan pada struktur adat (Marta et al., 2022).

Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2011–2013 menunjukkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, BNPB, dan masyarakat lokal. Keberhasilan pemulihan Merapi sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat sebagai aktor utama yang memahami ruang hidupnya, sekaligus penerapan pendekatan berbasis komunitas yang inklusif (Setyawati et al., 2015).

Contoh konkret implementasi kebijakan adalah Pembangunan Hunian Tetap melalui Program REKOMPAK yang mengusung prinsip *community-based reconstruction*. Program ini tidak hanya menyediakan infrastruktur tahan bencana, tetapi juga mengakomodasi nilai harmoni dan kohesi sosial masyarakat Merapi. Penelitian yang dilakukan Isnainiati et al. (2014) menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas dalam proses rekonstruksi dapat mempercepat pemulihan psikososial dan memperkuat identitas sosial pascabencana.

Pemerintah juga melakukan pemulihan ekonomi melalui revitalisasi pertanian, peternakan, UMKM, penyediaan benih cepat panen dan bantuan modal usaha (Alam et al., 2013). Pemulihan ekonomi yang cepat menjadi kunci bagi ketahanan masyarakat, karena mayoritas kehilangan mata pencaharian pascaerupsi (Wijayanti, 2013).

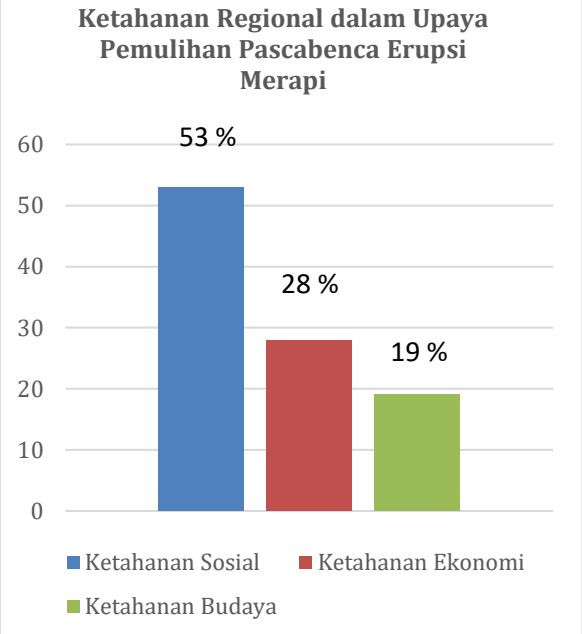
Menariknya, kreativitas masyarakat dan dukungan pemerintah melahirkan inovasi pemulihan ekonomi berbasis pariwisata, seperti *Volcano Tour*, yang dibuka sejak Desember 2010 oleh Pemerintah Desa Umbulharjo. Banyak peneliti mencatat bahwa model ini berhasil menghubungkan pemulihan ekonomi, pelestarian budaya lokal, dan edukasi kebencanaan dalam satu paket wisata bencana yang berkelanjutan (Wardyaningrum, 2019).

Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa pola pemulihan pascabencana di Kabupaten Sleman menjadi salah satu contoh keberhasilan integrasi antara regulasi formal, praktik kolaboratif pemerintah–masyarakat, serta penguatan nilai budaya lokal. Pendekatan ini membuktikan bahwa pemulihan tidak hanya bersifat teknis dan fisik, tetapi juga menyentuh dimensi sosial budaya yang menjadi fondasi ketangguhan masyarakat Merapi.

Strategi Pemulihan Pascabencana Erupsi Gunung Merapi untuk Ketahanan Wilayah

Ketahanan (*resilience*) merujuk pada kemampuan suatu sistem untuk pulih dari guncangan atau membangun kapasitas agar mampu menghadapi guncangan di masa depan. Ketahanan wilayah merupakan bagian dari kajian yang lebih luas mengenai konsep ketahanan dalam geografi manusia (Hassink & Gong, 2020). Dalam konteks erupsi Gunung Merapi tahun 2010, ketahanan wilayah di Kabupaten Sleman dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator utama, yaitu ketahanan ekonomi daerah, ketahanan sosial masyarakat sekitar dan ketahanan budaya lokal. Sejumlah kegiatan dilakukan untuk merancang konsep pengurangan risiko bencana secara lebih visioner dengan tujuan mempersiapkan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang (Puthut & Sirimorok, 2010).

Pada Grafik 1 terlihat bahwa dalam upaya pemulihan pascaerupsi, aspek yang paling dominan adalah ketahanan sosial masyarakat, diikuti oleh ketahanan ekonomi, dan terakhir ketahanan budaya. Dalam indikator ketahanan sosial masyarakat, perkembangan solidaritas sosial di wilayah sekitar Merapi tidak berlangsung secara bertahap. Terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi kerentanan sosial di daerah rawan bencana, yaitu status sosial ekonomi dan infrastruktur, gender serta usia dan pertumbuhan penduduk serta struktur keluarga (Siagian et al., 2014). Setiap aktivitas warga mencerminkan nilai solidaritas yang berbeda solidaritas mekanis dapat lebih menonjol pada kondisi tertentu, sementara solidaritas organik mendominasi pada konteks lain. Hal ini tidak terlepas dari falsafah hidup masyarakat Jawa, di mana seseorang diharapkan mampu menempatkan diri secara proporsional: sebagai individu sekaligus bagian dari kehidupan sosial.



Grafik 1. Analisis Ketahanan Wilayah dalam Upaya Pemulihan Pasca Letusan Merapi
Sumber: Data primer yang diolah dengan NVIVO 12

Penerapan prinsip dan nilai luhur yang menjadi dasar sikap manusia terhadap alam dan sesama, tercipta keharmonisan khas masyarakat Merapi. Mereka tidak

hanya membangun solidaritas dengan sesama manusia yang terikat hubungan kekerabatan, tetapi juga menjalin harmoni dengan entitas nonfisik yang dipercaya menjaga keseimbangan alam (Yusrifa, 2017). Sebelum erupsi, masyarakat tradisional Merapi umumnya memiliki struktur sosial sederhana tanpa pembagian kerja yang kompleks. Namun, pada saat erupsi, muncul sikap individualistis ketika warga berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Setelah erupsi, solidaritas mekanis kembali tampak melalui upaya masyarakat untuk melanjutkan kehidupan seperti sebelum bencana. Sementara itu, solidaritas organik mulai berkembang bersamaan dengan perubahan struktur sosial dan munculnya keragaman profesi dalam kegiatan pemulihan berbasis kearifan lokal.

Solidaritas organik lebih terlihat pada komunitas yang bergantung pada sektor pariwisata dan berupaya mengakomodasi peran serta kemampuan setiap anggota masyarakatnya. Meski demikian, nilai kebersamaan tetap menjadi dasar utama, menjaga kesadaran kolektif agar tidak tergerus sikap egoistis. Dari sisi ketahanan ekonomi, erupsi Merapi tahun 2010 menyebabkan kemerosotan di berbagai sektor, terutama ekonomi masyarakat di lereng gunung akibat kehilangan ternak, tempat tinggal, dan mata pencaharian. Dalam rangka pemulihan ekonomi, pemerintah bersama masyarakat terdampak berinovasi menjadikan wilayah bekas erupsi sebagai destinasi wisata, yang kini dikenal dengan kawasan wisata *Volcano Tour* (Wijayanti, 2013).

Dalam konteks ketahanan budaya, masyarakat Merapi sebagai bagian dari entitas Jawa menginternalisasi prinsip *guyub rukun* sebagai bentuk mitigasi bencana berbasis kearifan lokal. Nilai harmoni sosial ini tampak dalam tradisi seperti upacara *labuhan*, berbagai ritual adat terkait keseimbangan alam, serta partisipasi warga dalam proses evakuasi dan pemulihan ekonomi pascaerupsi. Konsep *guyub rukun* berakar pada falsafah *Larasing Tripita Cipta Kirana* yang menekankan terciptanya kehidupan yang selaras. Fenomena ini sejalan dengan teori solidaritas sosial Émile Durkheim dalam Yusrifa (2017) yang menjelaskan bagaimana ikatan kolektif terbangun melalui nilai kebersamaan. Solidaritas mekanis tampak dominan pada praktik gotong royong sebelum dan sesudah erupsi, sedangkan solidaritas organik muncul saat masyarakat menyesuaikan diri dengan peran ekonomi baru yang lebih beragam.

Secara umum, solidaritas mekanis masih mendominasi kehidupan masyarakat

Merapi, didorong oleh kuatnya nilai persaudaraan dan kebersamaan. Banyak warga menolak relokasi dan memilih tinggal bersama dalam hunian sementara maupun permanen. Dalam membangun kehidupan baru, mereka bekerja sama mengembangkan potensi wisata di Desa Kinahrejo serta memulihkan usaha peternakan di Glagahrejo (Gunawan, 2014). Sebagai masyarakat sosial, warga Merapi maupun Yogyakarta pada umumnya memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat serta menjunjung tinggi nilai kerja sama.

Kesejahteraan masyarakat terwujud melalui mitigasi bencana berbasis kearifan lokal. Signifikansi kearifan lokal ini telah menjadi bahan diskusi dalam *Global Platform for Disaster Risk Reduction* di Jenewa pada tahun 2013, yang menekankan bahwa solusi lokal tidak mengurangi tanggung jawab pemerintah nasional. Dalam konteks pemulihan pascaerupsi Merapi, pemerintah berperan menyediakan kerangka kerja dan lingkungan yang memungkinkan aksi lokal berjalan efektif. Pendekatan berbasis budaya yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada pemberdayaan diidentifikasi sebagai kunci dalam membangun ketahanan masyarakat secara berkelanjutan. Pendekatan berbasis budaya yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada pemberdayaan diidentifikasi sebagai kunci keberhasilan membangun ketahanan masyarakat secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Sleman telah berhasil memperkuat pilar-pilar ketahanan wilayah melalui berbagai program pemulihan, berbasis komunitas. Namun, tantangan ke depan adalah mengintegrasikan nilai-nilai lokal tersebut dengan sistem pengetahuan modern. Integrasi ini diperlukan karena pengetahuan ilmiah seperti pemetaan risiko berbasis teknologi, sistem peringatan dini, dan analisis bahaya berbasis data memberikan akurasi dan prediktabilitas yang tidak dapat sepenuhnya disediakan oleh pengetahuan tradisional. Sinergi keduanya memungkinkan masyarakat memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang risiko, memadukan intuisi lokal dengan bukti ilmiah, sehingga strategi mitigasi menjadi lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Analisis ketahanan wilayah mencakup dua dimensi utama, yakni dimensi proses dan implikasi. Dimensi proses menyoroti ketangguhan dan daya juang masyarakat, sedangkan dimensi implikasi melihat bagaimana ketahanan tersebut berdampak pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Berkes & Ross, 2013). Upaya

penanggulangan bencana pada setiap tahapnya perlu melibatkan lembaga pemerintah, kelompok masyarakat sipil, dan sektor swasta. Berdasarkan teori manajemen, pelaksanaan penanggulangan bencana mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan secara menyeluruh (Coulter, 2007). Masyarakat lereng Merapi dikenal terbuka terhadap inovasi, terutama dalam bidang manajemen bencana, dengan hampir seluruh program mitigasi dan pemulihan yang dilaksanakan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kearifan lokal masyarakat lereng Gunung Merapi berperan dalam membangun ketahanan wilayah pascaerupsi dengan menggunakan pendekatan hermeneutika-filosofis dan analisis kualitatif interpretatif. Melalui integrasi metode bibliometrik (*VOSViewe*r) dan analisis kualitatif berbantuan *NVivo*, penelitian ini menafsirkan nilai, simbol, tradisi, dan praktik sosial masyarakat Merapi yang membentuk kekuatan adaptif dalam menghadapi bencana. Pendekatan interpretatif ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang hubungan antara budaya lokal dan ketahanan wilayah yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui data teknis atau kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal terutama sistem nilai seperti *guyub rukun*, *hamemayu hayuning bawana*, dan solidaritas sosial menjadi fondasi utama bagi masyarakat Merapi dalam menghadapi ancaman erupsi. Tradisi seperti L*abuhan, Merti Bumi dan Gugur Gunung* menguatkan kohesi sosial yang berfungsi sebagai modal sosial dalam proses mitigasi, evakuasi, dan pemulihan. Nilai-nilai ini bekerja saling melengkapi dengan pengetahuan ilmiah modern, membentuk pola adaptasi yang dinamis dan kontekstual bagi masyarakat di kawasan rawan bencana.

Temuan juga memperlihatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman berhasil mengembangkan kerangka penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah. Program rehabilitasi dan rekonstruksi, seperti REKOMPAK serta berbagai program pemulihan ekonomi dan sosial, menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas efektif mempercepat proses pemulihan pascaerupsi. Integrasi antara nilai lokal dan teknologi modern terbukti memperkuat ketahanan wilayah secara berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah daerah perlu terus memperkuat dokumentasi, revitalisasi, dan integrasi

kearifan lokal ke dalam kebijakan mitigasi bencana berbasis bukti. Pelatihan kebencanaan yang menggabungkan perspektif ilmiah dan budaya lokal perlu dilembagakan dalam pendidikan formal maupun nonformal. Pemerintah juga perlu memperluas kolaborasi lintas sektor pemerintah, akademisi, komunitas lokal, dan sektor swasta dengan pendekatan *whole-of-society* agar sistem penanggulangan bencana semakin inklusif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan risiko.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan karena bergantung pada kajian literatur dan analisis berbasis dokumen tanpa pengumpulan data lapangan secara langsung. Keterbatasan ini dapat memengaruhi kedalaman temuan empiris, terutama terkait dinamika terbaru di tingkat komunitas. Penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta analisis komparatif antar wilayah rawan bencana lain di Indonesia agar diperoleh pemahaman yang lebih kontekstual dan kaya mengenai integrasi kearifan lokal dan manajemen bencana berbasis komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Z. (2019) 'Community Resilience: Lesson Learnt from Disaster Survivors in Yogyakarta Province Indonesia'. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 273*. https://doi.org/10.1088/1755131 5/273/1/012036.

Alam, P. C., Nurcahyanto, H and Sulandari, S. (2013) 'Upaya Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah'. *Journal of Public Policy and Management Review*, 2(3), pp. 169-181. https://doi.org/10.14710/jppmr.v 2i3.3043.

Anjasni. B. (2013) 'SWOT Assesment of the Community Potency to Determine the Strategic Planning for Volcano Eruption Disaster Management (Case Study in Cangkringan, Yogyakarta Province)'. *Procedia Environmental Sciences, 17*, pp. 337-343. https://doi.org/10.1016/j.proenv. 2013.02.046.

Antriyandarti, E., Ferichani. M and Ani SW (2013) 'Sustainability of Post-Eruption Socio Economic Recovery for the Community on Mount Merapi Slope Through Horticulture Agribusiness Region Development (Case Study in Boyolali District)'. *Procedia Environmental Sciences 17*,

pp. 46-52. https://doi.org/10.1016/j.proenv.2013.02.01.

Bakkour, D., Enjolras, G., Thouret. J. C., Kast, R., Mei, E. T. W and Prihatminingtyas, B. (2015) 'The Adaptive Governance of Natural Disaster Systems: Insights from the 2010 Mount Merapi Eruption in Indonesia'. *International Journal of Disaster Risk Reduction, 13(1*), pp. 167-188. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2015.05.006.

Bazeley, P., & Jackson, K. (2013). *Qualitative Data Analysis with NVivo* (2nd ed.). SAGE Publications.

Berkes, F and Ross, H. (2013) 'Community Resilience: Toward in Integrated Approach. *Society & Natural Resources an International Journal*, 26(1), pp. 5-20. https://doi.org/10.1080/08941920.2012.736605.

Buchari, R. A. (2020) 'Manajemen Mitigasi Bencana dengan Kelembagaan Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Kabupaten Garut Indonesia'. *Sawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial Desa dan Masyarakat 1*(1), pp. 1-10. https://doi.org/10.24198/sawala.v1i1.25836.

Coulter, M. (2007*). 'Management (Ninth Edition)'*. New York: Pearson Prentice Hall.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Daeng, H. J. (2008) *'Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungan: Tinjauan Antropologis*'. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Djalante. R., Holley, C., Thomalla, F and Carnegie, M. (2013) 'Pathways for Adaptive and Integrated Disaster Resilience'. *Natural Hazards, 69*(3), pp. 2105-2135. https://doi.org/10.1007/s11069-013-0797-5.

Gadamer, H. G. (2013). *Truth and Method*. Revised edition. London: Bloomsbury Academic.

Gunawan. (2014) 'Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana: Kasus di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman di Yogyakarta'. *Sosio Informas, 19*(2), pp. 91-106. https://dx.doi.org/10.33007/inf.v19i2.30.

Hassink, R and Gong, H. (2020) 'Regional Resilience. *International Encyclopedia of Human Geography*, pp. 351-355. https://doi.org/10.1016/b978-0-08-102295-5.10126-x.

Hediarto, I. (2016) 'Optimalisasi Peran Kodim Dalam Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam dan Implikasinya terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Kodim 0613/Ciamis Jawa Barat)'. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(3), pp. 321-333. https://doi.org/10.22146/jkn.15996.

Hudayana. B. (2021). Reproduction of Volcanic Rituals in Appealing for the Right to Live in Disaster Prone Zones on Mount Merapi'. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 34(2). Pp. 235-247. https://doi.org/10.20473/mkp.v34i22021.235-247.

Huda, A. A. S., Nurhuda, A., Setyaningtyas, N. A., Syafi'i, M. I., & Putra , F. A. (2025). Hermeneutika dalam Ilmu-Ilmu Humaniora dan Agama: Model, Pengembangan dan Metode Penelitian. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, *4*(1), 14–26. https://doi.org/10.58363/alfahmu.v4i1.239

Isnainiati, N., Mustam, M and Subowo, A. (2014). 'Kajian Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Merapi di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman'. *Journal of Public Policy and Management Review,* 3(3), pp. 25-34. https://doi.org/10.14710/jppmr.v3i3.

Kurniawati, D and Suwito. (2017). Pengaruh Pengetahuan Kebencanaan terhadap Sikap Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Kanjuruhan Malang. *E-Journal Unikama,* 2(2), pp. 135-142. https://dx.doi.org/10.21067/jpig.v2i2.3507.

Maharani, Y. N., Nugroho, A. R. B., Adiba, D. F and Sulistiyowati I. (2020) 'Disaster Risk Reduction by Measuring Social Vulnerability Around the Merapi Volcano'. *AIP Conference Proceedings, 2245 (1)*. https://doi.org/10.1063/5.0006828.

Marta, R. F, Supina, S, Fernando, E, Yohanes, W and Cahyanto, I. D. P. (2022) 'Exploration of Kejawen in "Visit Central Java" Version of KukuBima Ener-G Advertisement'. *EduLite: Journal of English*

Education Literature and Culture, 7(1), pp. 160-176. https://doi.org/10.30659/e.7.1.160-176.

Mei, E. T. W., Fajarwati, A., Hasanati, S and Sari, I. M. (2016) 'Resettlement Following The 2010 Merapi Volcano Eruption'. *Procedia-Social and Behavioral Sciences, 227*, pp. 361-369. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.083.

Mohtar, O. (2023) 'Riwayat Erupsi Besar Merapi dari Masa Klasik hingga Kolonial'. *Tirto.* https://tirto.id/riwayat-erupsi-besar-merapi-dari-masa-klasik-hingga-kolonial-gEkq.

Muslih, M., Rohman, A., AL Manaanu, Y., & Aziz, A. (2021). Pengembangan Ilmu Sosial Model Fenomenologi dan Hermeneutika. *Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika,* 7(1), pp. 1-13. https://dx.doi.org/10.30870/hermeneutika.v7i1.10160.g7277.

Otani, K., Legono, D., Darsono, S and Suharyanto. (2018). 'Effects of Disaster Management Programs on Individuals' Preparedness in Mount Merapi. *Journal of the Civil Engineering Forum*, 4(1), pp. 79-90. https://doi.org/10.22146/jcef.2980.

Permana, S. A., Hartanto, S., Purwatiningsih, A and Magiman, M. M. (2020) 'Community based Mount Merapi Eruption Disaster Management'. *Hamdard Islamicus,* 43(1), pp. 802-816. https://doi.org/10.17762/pae.v58i2.2346.

Prakoso. S. G., Wijaya, A. A and Putra, F. A. (2022) 'Indonesia's Disaster Resilience Against Volcanic Eruption: Lessons from Yogyakarta'. *KnE Social Sciences*, pp. 114-125. https://doi.org/10.18502/kss.v7i5.10544.

Puthut, E. A and Sirimorok, N. (2010). '*Bencana Ketidakadilan: Refleksi Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia*'. Jakarta: INSISTPress dan LPTP.

Rahman, M. B., Nurhasanah, I. S and Nugroho, S. P. (2016) 'Community Resilience: Learning from Mt Merapi Eruption 2010. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 227, pp. 387-394. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.090.

Romadhoni, B. A and Weadcaksana, H. A. (2025) 'Gunung Merapi Muntahkan Dua Kali Awan Panas dan Ratusan

Lava Sepekan Terakhir'. *SuaraJogja.* https://jogja.suara.com/read/2025/10/04/132628/gunung-merapi-muntahkan-dua-kali-awan-panas-dan-ratusan-lava-sepekan-terakhir.

Siagian T. H., Purhadi, P., Suhartono, S and Ritonga, H. (2014) 'Social Vulnerability to Natural Hazards in Indonesia: Driving Factors and Policy Implications. *Natural Hazards*, 70(2), pp. 1603-1617. https://doi.org/10.1007/s11069-013-0888-3.

Setyawati, S., Pramono, H and Ashari, A. (2015) 'Kecerdasan Tradisional Dalam Mitigasi Bencana Erupsi Pada Masyarakat Lereng Barat Daya Gunungapi Merapi'. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 12(2*), pp. 100 110. https://doi.org/10.21831/socia.v12i2.12240.

Stanickova, M and Melecký, L. (2018). 'Understanding of Resilience in the Context of Regional Development Using Composite Index Approach: The Case of European Union NUTS-2 Regions'. *Regional Studies, Regional Science*, 5(1), pp. 231-254. https://doi.org/10.1080/21681376.2018.1470939.

Tyas, R. A, Pujianto and Suyanta. (2021) 'Caring for Labuhan Merapi Tradition, One of the Local Wisdom Based Disaster Risk Reduction Efforts. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 13(1), pp. 69-77. https://doi.org/10.15294/komunitas.v13i1.26335.

van Eck, N. J and Waltman, L. (2010) 'Software Survey: VOSviewer, a Computer Program for Bibliometric Mapping'. *Scientometrics,* 84(2), pp. 523-538. https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3.

Wahyuni, H and Sakir. (2021). Pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Di Daerah Rawan Bencana Kabupaten Sleman'. *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*, 9(1), pp. 131-150. https://doi.org/10.24269/ars.v9i1.2366.

Wardyaningrum, D. (2019) 'Communication of Local People about Myths of Merapi Mountain in Disaster Mitigation'. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 8(1), pp. 49-57. https://doi.org/10.7454/jki.v3i1.10245.

Wasisto, M. A. (2021) 'Reflecting on Kejawen: Javanese Esoteric

Teachings in Indonesian National Development'. *Udayana Journal of Law and Culture*, 5(2), pp. 96-118. https://doi.org/10.24843/ujlc.2021.v05.i02.p01.

Wijayanti, A. R. (2013). 'Perubahan Pekerjaan Masyarakat sebagai Akibat dari Bencana (Studi Kasus: Kawasan Wisata Volcano Tour Gunung Merapi, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman)'. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 24 (1), pp. 19-34.

Yusrifa, F. (2017) 'Konsep Guyub Rukun Masyarakat Merapi dalam Menghadapi Gejala dan Dampak Erupsi Ditinjau dari Teori Solidaritas Sosial Emile Durkheim'. *Tesis.* Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Yusrifa, F and La'ia, D. Y. W. (2015) 'Memayu Hayuning Bawana: Membangun Ikatan Kosmik Antara Wisatawan dan Gunung Merapi untuk Mendukung Sustainable Development Goals'. *The 1st Indonesian Youth Conference on Sustainable Development,* pp. 1-10